

Kajian indikator ekonomi dan komoditas unggulan kabupaten mamuju menuju status kota

Madris¹, Sabir², Juliansyah Roy³

^{1,2}Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Mulawaman, Samarinda.

¹Email: madris@fe.unhas.ac.id

²Email: sabir_feunhas@yahoo.co.id

³Email: juliansyah.roy@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang indikator ekonomi dan sektor basis Kabupaten Mamuju menuju status kota di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan Penelitian adalah untuk (1) Memetakan sektor ekonomi melalui besaran sektor basis. (2) Mengidentifikasi komoditi unggulan (3) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabuapten Mamuju menuju Mamuju Status Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Analisis location quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kabupaten Mamuju dalam Angka, masing-masing selama tahun 2009-2015, serta kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju (1) masuk dalam kategori kota sedang berdasarkan jumlah penduduk; (2) sektor primer memiliki share terendah di antara kabupaten lain di Sulawesi Barat, dan mengalami penurunan share setiap tahun; (3) mengalami angka pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Sulawesi Barat; (4) Di antara 17 sektor yang dianalisis, Kabupaten Mamuju memiliki 14 sektor dalam kategori basis; (5) Rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan belanja daerah (APBD) selama enam tahun terakhir sebesar 4,73 persen, sementara rata-rata secara nasional sebesar 6,3 persen.

Kata Kunci: Kajian ekonomi; komoditas unggulan; status kota

The study of economic indicators and the regency's leading commodities is moving towards city status

Abstract

This research discusses the economic indicators and sector basis of Mamuju Regency towards city status in West Sulawesi Province. The research objectives are to (1) map the economic sector by means of the size of the sector basis. (2) Identifying leading commodities (3) Providing policy recommendations to the Government of Mamuju District towards Mamuju City Status. The analytical method used is descriptive and comparative analysis. The location quotient (LQ) analysis is used to identify the sector basis. This study uses secondary data, namely data on Gross Regional Domestic Product (PDRB) and Mamuju District in Figures, respectively during 2009-2015, as well as other districts in West Sulawesi. The results showed that Mamuju District (1) was included in the medium city category based on the population; (2) the primary sector has the lowest share among other districts in West Sulawesi, and has decreased its share every year; (3) experiencing the second highest rate of economic growth in West Sulawesi; (4) Among the 17 sectors analyzed, Mamuju District has 14 sectors in the basic category; (5) The average contribution of own-source revenue (PAD) to total regional expenditure income (APBD) for the last six years was 4.73 percent, while the national average was 6.3 percent.

Keywords: *Economic studies; superior commodity; city status*

PENDAHULUAN

Ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauhmana berbagai sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki suatu daerah memiliki kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam meliputi pertanian, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Sedangkan potensi sumberdaya manusia, selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja menurut lapangan pekerjaan yang sekaligus menggambarkan kesempatan kerja yang tersedia berdasarkan sektor ekonomi. Untuk menggarap sumberdaya alam sebagai sebuah potensi ekonomi, diperlukan kekuatan modal, sumberdaya manusia berkualitas, dan teknologi tepat guna dan berdayaguna. Sebuah potensi ekonomi suatu daerah hanya akan dilirik oleh investor jika memiliki prospek pengembangan nilai ekonomis yang tinggi di masa depan.

Pencapaian laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan perluasan kesempatan kerja merupakan hal yang cukup fundamental bagi pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi adalah merupakan suatu proses kegiatan investasi yang diarahkan kepada perubahan struktur dan keserasian keterkaitan antar sektor guna mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di suatu negara atau daerah dalam jangka panjang.

Walaupun potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah cukup besar secara kuantitatif, namun tidak dengan serta-merta, seluruhnya dapat terwujud menjadi kekuatan ekonomi produktif. Olehnya itu, potensi tersebut perlu dipilah dalam skala prioritas unggulan daerah agar supaya penggunaan sumberdaya untuk menggarapnya tidak menjadi sia-sia. Hal ini penting pula artinya bagi para investor yang mencoba melirik berbagai potensi tersebut menjadi sebuah peluang investasi.

Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembangunan ekonomi, baik dalam aspek pertumbuhan ekonomi maupun dalam aspek penciptaan kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbalan jasa ataupun penghasilan dalam jangka waktu tertentu. Jika hal tersebut berjalan sesuai asumsi pembangunan yang ada maka angka kemiskinan tereliminir sesuai target dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan.

Menyadari potensi ekonomi Kabupaten Mamuju yang begitu besar dan dilandasi pula dengan Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Deprtemen Dalam Negeri No:500/1404/V/Bangda/2007 yang mendesak agar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Mamuju, maka perlu dan sangat penting dilaksanakan pemetaan potensi ekonomi unggulan daerah untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi menjadi komoditi yang produktif serta dalam upaya proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif.

Bertolak dari beberapa aspek pemikiran tersebut di atas, maka dilakukan kajian ekonomi secara sektoral dan identifikasi komoditi unggulan Kabupaten Mamuju untuk perumusan perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Mamuju ke depan dan dalam rangka lebih memperkuat pondasi dan ketahanan ekonomi Mamuju jika kelak sudah menjadi Kota Mamuju.

Informasi tentang potensi ekonomi Kabupaten Mamuju sekarang menjadi bagian yang sangat penting bagi pemerintah “Kota Mamuju” ke depan dalam rangka menarik minat investor swasta baik domestik maupun luar negeri untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi “Kota Mamuju” sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan apa yang tersurat dan tersirat berdasarkan fakta-fakta empiris selama lima tahun terakhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat, PDRB Kabupaten Mamuju, dan PDRB kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, serta data Kabupaten Mamuju dalam Angka, masing-masing selama periode tahun 2010-2015.

Untuk menganalisis permasalahan penelitian yang ada, maka digunakan metode analisis komparatif, analisis location quotient (LQ), dan analisis kemandirian fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penduduk dan tenaga kerja

Penduduk Kabupatén Mamuju pada tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi sebanyak 265.800 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 53 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mamuju, yakni 319 orang per km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mamuju di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Tenaga kerja sebagai salah satu modal bagi pembangunan suatu wilayah, menunjukkan bahwa jumlah dan komposisi tenaga kerja terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2015 di Kabupaten Mamuju terdapat 180.373 penduduk usia kerja, umur 15 tahun ke atas. Sebagian besar dari penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,06 persen pada tahun 2015 (BPS, Kabupaten Mamuju, 2016). Penduduk bekerja paling kurang satu jam se minggu yang lalu pada tahun 2015 mencapai 121.587 orang atau 96,22 persen terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebesar 4.776 orang. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 3,78 persen.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka terdapat 42.984 penduduk yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan SMP ke bawah atau sebesar 35,35 persen (BPS, Kabupaten Mamuju, 2016).

Struktur Ekonomi

Pada dasarnya teori-teori tentang pergeseran struktur ekonomi menjelaskan fenomena terjadinya perubahan struktur di negara sedang berkembang yang didominasi kegiatan perekonomian pedesaan yang bergerak menuju kepada kegiatan perekonomian yang berorientasi perkotaan dalam bentuk industri maupun jasa. Secara umum pergeseran struktur ekonomi ditandai oleh peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor produksi primer (pertanian) menuju kepada sektor sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor jasa.

Kuznets (Jhingan, 2000) mengemukakan bahwa terjadinya pergeseran struktur ekonomi dalam proses pembangunan bukan hanya karena adanya perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub sektor dalam pembangunan ekonomi, tetapi karena adanya perubahan kontribusi berbagai sektor ekonomi kepada produk nasional dalam proses tersebut. Kuznets menyimpulkan bahwa terjadi perubahan sumbangan sektor pertanian sektor industri, dan sektor jasa terhadap produksi nasional corak perubahan tersebut diantaranya adalah (1) kontribusi sektor pertanian terhadap produk nasional menurun, (2) kontribusi sektor industri terhadap produksi nasional meningkat, dan (3) kontribusi sektor jasa terhadap produk nasional tidak mengalami perubahan.

Pengertian tentang pergeseran struktur ekonomi tentunya harus dipahami secara jernih dengan menggunakan konsep-konsep primer, sekunder, dan tertier. Pergeseran struktur ekonomi juga dapat dipahami dari proses perubahan kegiatan ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dan ketergantungan kepada kemandirian.

Tabel 1. Rata-rata share output sektoral terhadap pdrb menurut kabupaten, periode tahun 2010–2015

NO	INDIKATOR/SEKTOR	KABUPATEN					
		MAJENE	POLMAN	MAMASA	MAMUJU	MAMUJU UTARA	MAMUJU TENGAH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.62	39.14	36.43	35.27	47.92	70.60
2	Pertambangan dan Penggalian	2.40	2.10	1.83	3.20	1.00	1.16
3	Industri Pengolahan	5.52	6.35	5.42	3.71	23.54	10.29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.06	0.02	0.07	0.02	0.02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.16	0.10	0.33	0.01	0.06
6	Konstruksi	7.44	7.28	7.19	10.35	7.58	1.22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.86	15.92	11.11	10.40	4.98	4.52
8	Transportasi dan Pergudangan	1.91	1.49	1.21	2.24	1.66	0.72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.28	0.28	0.36	0.28	0.14	0.20
10	Informasi dan Komunikasi	4.63	5.00	3.43	7.12	1.20	1.08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.22	2.20	2.10	2.74	0.58	0.76
12	Real Estate	3.54	3.78	4.93	2.50	1.63	3.75
13	Jasa Perusahaan	0.05	0.11	0.09	0.12	0.08	0.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.56	6.78	13.13	11.40	4.40	1.14
15	Jasa Pendidikan	8.76	4.66	9.15	5.56	2.77	3.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.40	2.41	2.43	2.01	2.01	0.29
17	Jasa lainnya	3.57	2.29	1.06	2.70	0.49	0.20
TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka nampak pada Tabel 1, bahwa pola atau struktur ekonomi Sulawesi Barat berdasarkan kabupaten relatif sama antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, kecuali Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sangat didominasi oleh sektor pertanian, yakni sebesar 70,60 persen secara rata-rata selama tahun 2010-2015.

Kemudian share sektor industri pengolahan dominan di Kabupaten Mamuju Utara, yakni masing-masing 23,54 persen pada periode tahun yang sama. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki share 10,00 persen ke bawah.

Di sisi lain, sektor perdagangan besar dan eceran relatif besar di Kabupaten Polman, yakni sebesar 15,92 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Mamasa sebesar 11,11 persen, dan Kabupaten Mamuju sebesar 10,40 persen pada tahun periode yang sama.

Untuk sektor pemerintahan, pertahanan, dan sosial kemasyarakatan wajib, nampak dominan di Kabupaten Mamasa dan Majene, masing-masing sebesar 13,13 persen dan 11,56 persen, kemudian posisi ke tiga Kabupaten Mamuju pada periode yang sama.

Lalu sektor konstruksi, memiliki share yang relatif sama di antara enam kabupaten yang ada, yakni sekitar 7,00 persen, kecuali Kabupaten Mamuju 10,35 persen menempati urutan tertinggi, sebaliknya Kabupaten Mamuju Tengah urutan terendah, yakni 1,22 persen pada periode yang sama.

Sektor yang dominan berikutnya adalah sektor jasa pendidikan. Sektor ini dominan di Kabupaten Mamasa dan Majene, yakni masing-masing 9,15 dan 8,76 persen terhadap PDRB kabupaten masing-masing, kemudian disusul oleh Kabupaten Mamuju (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat), sebesar 5,56 persen.

Kemudian, tiga sektor yang memiliki share terendah di masing-masing kabupaten, yakni pengadaan listrik dan gas (masing-masing di bawah 0,10 persen). Disusul sektor jasa perusahaan (masing-masing di bawah 0,13 persen), dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (masing-masing di bawah 0,34 persen).

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Kuznets (Jhingan 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya dengan kata lain,

perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Adisasmita (2005) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi regional adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari sub-sistem spasial suatu bangsa atau negara. Pertumbuhan ekonomi, dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah atau diartikan sebagai peningkatan dalam sejumlah komoditi yang dapat digunakan atau diperoleh di suatu daerah.

Terkait dengan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan kapasitas dan volume produksi barang dan jasa yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan komposisi output di masing-masing sektor dari tahun ke tahun sangat ditentukan besar kecilnya perubahan angka pertumbuhan ekonomi secara sektoral. Sektor yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi dan trend tinggi akan merubah komposisi secara sektoral.

Tabel 2. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral menurut kabupaten di provinsi sulawesi barat periode tahun 2010–2015

NO	SEKTOR EKONOMI	KABUPATEN					
		MAJENE	POLMAN	MAMASA	MAMUJU	MAMUJU UTARA	MAMUJU TENGAH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	6.75	3.15	7.62	8.03	7.01
2	Pertambangan dan Penggalian	10.27	10.77	15.99	9.12	12.75	9.07
3	Industri Pengolahan	4.55	8.50	7.03	8.77	22.09	7.40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.69	6.65	7.98	12.41	37.73	10.76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.76	10.90	13.64	15.85	20.49	9.43
6	Konstruksi	7.13	10.22	10.86	7.16	12.99	9.73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.25	7.90	4.67	8.69	8.90	5.27
8	Transportasi dan Pergudangan	5.44	7.37	6.10	7.17	8.74	5.83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.71	8.19	7.42	10.77	9.32	7.68
10	Informasi dan Komunikasi	9.44	8.37	5.44	11.19	11.69	8.40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.94	10.98	8.88	11.12	13.35	10.51
12	Real Estate	4.83	5.63	2.61	5.07	3.52	3.91
13	Jasa Perusahaan	6.53	9.94	6.26	7.36	6.83	6.53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.98	11.77	10.20	16.24	13.20	16.61
15	Jasa Pendidikan	10.89	10.66	10.15	10.20	14.19	4.59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.16	9.57	9.18	8.49	15.29	4.97
17	Jasa lainnya	3.44	6.82	3.18	12.08	10.07	6.16
PERTUMBUHAN EKONOMI		6.35	8.06	6.16	9.24	12.13	6.92

Terkait dengan hal tersebut Tabel 2, nampak bahwa sektor ekonomi yang memiliki angka pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas (37,43 %), kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan (22,09 %) per tahun, masing-masing di Kabupaten Mamuju Utara.

Kemudian sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki angka pertumbuhan tertinggi ke tiga di Kabupaten Mamuju Utara, yakni sebesar 20,49 persen per tahun. Pada saat yang di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jasa sosial pemerintahan jasa kesehatan dan sektor sosial memiliki angka pertumbuhan masing-masing sebesar 16,61 persen, dan 16,24 persen rata-rata per tahun selama tahun 2010-2015.

Kemudian Kabupaten Mamasa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor tertinggi angka pertumbuhannya, yakni 15,99 persen, rata-rata per tahun selama tahun 2010-2015. Lalu disusul sektor jasa kesehatan dan sektor sosial memiliki angka pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Mamuju Utara, yakni sebesar 15,29 persen per tahun. Kemudian sektor-sektor ekonomi lainnya masing-masing di bawah 15,00 persen per tahun.

Sektor basis

Studi mengenai pertumbuhan ekonomi daerah telah banyak dilakukan, mulai dari yang kompleks sampai kepada yang sederhana dan cukup populer, yakni teori basis ekonomi. Para praktisi dan ilmuwan tetap memanfaatkan teori basis dalam kegiatan-kegiatan penelitian empirik.

Pentingnya mengetahui sektor basis dan sektor non basis, karena diyakini hingga saat ini bilamana terdapat sektor basis pada suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin deras arus pendapatan yang mengalir masuk ke daerah tersebut. Sementara dalam kurun waktu yang panjang kesempatan kerja pada daerah yang bersangkutan juga akan terasa peningkatannya.

Dasar pemikiran dari penggunaan teknik ini, yakni teori economic base yang maknanya sebagai berikut: karena industri basis yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumen maupun kenaikan investasi di daerah itu, dan pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran, maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode location quotient (LQ) dalam menentukan sektor basis dan non basis. Untuk mengetahui apakah suatu merupakan sektor basis atau non basis, maka dengan melihat koefisien rasio antara output daerah kabupaten dalam sektor tertentu dengan output provinsi dalam sektor yang sama. Jika suatu sektor memiliki LQ lebih dari satu, maka sektor yang bersangkutan termasuk dalam kategori sektor basis, dan bilamana LQ kurang dari satu, maka sektor yang bersangkutan tidak termasuk sektor basis.

Kebaikan dari metode ini, selain memperhitungkan penjualan barang-barang juga penggunaannya tidak terlalu menuntut pengeluaran biaya yang besar dan dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui trend, namun demikian tidaklah berarti bahwa metode ini tidak memiliki kelemahan-kelemahan, terutama terletak pada asumsi-asumsi yang mendasarinya, antara lain, (a) pola-pola permintaan pada setiap daerah kabupaten, identik dengan pola permintaan provinsi, (b) perekonomian nasional (dalam hal ini provinsi) merupakan suatu perekonomian tertutup, dan (c) produktivitas tiap pekerja dalam sektor yang sama pada tingkat provinsi.

Tabel 3. Rata-rata angka location quotient (lq) menurut sektor ekonomi wilayah kabupaten di provinsi sulawesi barat selama periode 2010-2015

NO	SEKTOR EKONOMI	KABUPATEN						JUMLAH KAB. BASIS
		MAJENE	POLMAN	MAMASA	MAMUJU	MAMUJU UTARA	MAMUJU TENGAH	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.86	0.94	0.88	0.71	1.15	1.70	2
2	Pertambangan dan Penggalian	1.15	0.68	0.87	1.53	0.48	0.55	2
3	Industri Pengolahan	0.58	0.50	0.57	0.39	2.43	1.08	2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.72	0.81	0.44	1.29	0.44	0.32	2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.88	0.70	0.63	2.15	0.04	0.39	1
6	Konstruksi	0.97	0.69	0.94	1.36	0.99	0.16	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.96	1.16	1.08	1.01	0.49	0.44	3
8	Transportasi dan Pergudangan	1.14	0.60	0.72	1.34	0.99	0.43	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.14	0.75	1.45	1.14	0.55	0.79	3
10	Informasi dan Komunikasi	1.08	0.83	0.80	1.66	0.28	0.25	2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	0.75	1.06	1.38	0.29	0.38	3
12	Real Estate	1.17	0.85	1.62	0.82	0.53	1.23	3
13	Jasa Perusahaan	0.59	0.80	1.02	1.27	0.87	0.19	2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.43	0.62	1.63	1.41	0.55	0.14	3
15	Jasa Pendidikan	1.66	0.62	1.73	1.05	0.52	0.76	3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.71	0.84	1.23	1.02	1.01	0.15	3
17	Jasa lainnya	1.88	0.83	0.56	1.42	0.26	0.10	2
JUMLAH SEKTOR BASIS		10	1	8	14	3	3	39

Terkait dengan metode LQ tersebut, maka nampak pada Tabel 3, bahwa jumlah sektor basis di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 39 sektor, masing-masing 14 di antaranya ada di Kabupaten

Mamuju, 10 di Kabupaten Majene, dan hanya 1 di Kabupaten Polman. Kemudian dilihat dari jenis sektor basis, maka setiap sektor basis hanya terdistribusi maksimal di tiga kabupaten. Sebagai contoh, sektor konstruksi hanya unggul di Kabupaten Mamuju. Kemudian industri pengolahan hanya unggul di Kabupaten Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah, dan seterusnya.

Nampak, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah, sementara di Kabupaten lainnya bukan merupakan sektor basis secara rata-rata selama tahun periode 2010-2015. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, hanya unggul (sektor basis) di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Kemudian sektor industri pengolahan merupakan sektor basis di Kabupaten Mamuju Utara dengan Mamuju Tengah.

Di sisi lain, sektor listrik dan gas hanya unggul di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Sementara, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, demikian juga sektor konstruksi hanya unggul di Kabupaten Mamuju. Kemudian sektor perdagangan besar, dan eceran unggul di tiga kabupaten yakni Kabupaten Mamuju, Polman, dan Mamasa. Lalu, sektor transportasi dan pergudangan unggul di Kabupaten Majene dan Mamuju.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum unggul di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi hanya unggul di dua kabupaten, yakni Kabupaten Majene dan Mamuju. Hal yang sama juga untuk sektor jasa keuangan dan asuransi, dan juga sektor real estate keduanya unggul di Kabupaten Majene dan Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Tengah.

Di sektor lain, seperti sektor jasa pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, merupakan sektor basis di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju. Sedangkan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial unggul di tiga kabupaten, yakni di Kabupaten Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara.

Kemandirian fiskal daerah

Pola pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik di masa orde baru yang diterjemahkan melalui undang-undang No. 5 tahun 1974, telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi, dimanifestasikan melalui dasar hukum Undang-Undang No. 22 tahun 1999 serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 dan selanjutnya direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri: (i) hasil pajak daerah; (ii) hasil retribusi daerah; (iii) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 4. Kontribusi pad terhadap apbd di kabupaten mamuju periode 2010-2015

Tahun	APBD	PAD	Persentase PAD
2010	388,822,416,458.34	17,276,123,329.03	4.44
2011	681,717,187,330.00	19,176,951,316.00	2.81
2012	711,239,764,324.31	31,214,482,823.31	4.39
2013	838,719,310,145.23	31,144,602,951.00	3.71
2014	693,532,478,935.41	55,539,367,583.41	8.01
2015	914,528,311,946.27	58,825,608,892.07	6.43
Rata-Rata			4.97

Data empiris pada Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai penerimaan PAD dari tahun 2010 ke 2015 nampak mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni pada tahun 2010 tercatat Rp 17,27 milyar meningkat lebih tiga kali lipat, menjadi Rp 58,82 milyar pada tahun 2015. Kontribusi PAD terhadap APBD secara rata-rata hanya sebesar 4,97 persen selama tahun periode 2010-2015, sementara kabupaten/kota secara rata-rata nasional sekitar 6,5 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kemampuan/kemandirian fiska daerah Kabupaten Mamuju masih relatif rendah. Meskipun demikian, angka kemandirian tersebut cukup mengalami trend yang meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2015.

Peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Mamuju tersebut didominasi oleh peningkatan sumbangan pendapatan yang sah, kemudian disusul oleh penerimaan retribusi daerah, dan terkecil

adalah sumbangan penerimaan pajak daerah rata-rata sebesar 30,67 persen selama tahun periode 2010-2015, dan mencapai puncaknya sebesar 38,18 persen pada tahun 2012, sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Di sisi lain, sumbangan penerimaan retribusi daerah secara rata-rata terhadap PAD sebesar 32,42 persen, bahkan pada tahun 2015 mencapai puncaknya sebesar 49,98 persen, dan mengalami tren yang semakin meningkat.

Tabel 5. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pad di kabupaten mamuju periode 2010-2015

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Lainnya		Total PAD
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
2010	3,887,771,629.00	22.50	5,257,353,789.00	30.43	8,130,997,911.03	47.06	17,276,123,329.03
2011	5,672,584,580.00	29.58	6,531,587,150.00	34.06	6,972,779,586.00	36.36	19,176,951,316.00
2012	11,917,611,457.00	38.18	9,865,914,937.00	31.61	9,430,956,429.31	30.21	31,214,482,823.31
2013	10,482,033,626.00	33.66	10,682,540,435.00	34.30	9,980,028,890.00	32.04	31,144,602,951.00
2014	15,779,793,062.00	28.41	7,849,682,496.00	14.13	31,909,892,025.41	57.45	55,539,367,583.41
2015	18,648,541,037.00	31.70	29,401,986,709.40	49.98	10,775,081,145.67	18.32	58,825,608,892.07
Rata-Rata		30.67		32.42		36.91	

Sedangkan sumber pendapatan lainnya, seperti laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah, meskipun nilai dan kontribusinya berfluktuasi, namun kontribusi secara rata-rata menempati urutan tertinggi, yakni sebesar 36,91 persen selama periode tahun 2010-2016.

Jika kita amati angka kemandirian fiskal daerah Kabuapten Mamuju lebih jauh, dimana angka ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator berubahnya “status kabupaten” menjadi “status kota” suatu daerah otonom, maka nampak, bahwa angka kemandirian fiskal Kabupaten Mamuju berfluktuasi dan cenderung menurun. Namun, penurunan angka kemandirian fiskal daerah Kabuapten Mamuju, bukan karena penerimaan PAD menurun, tetapi peningkatan dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) yang cenderung semakin lebih besar, dimana secara implisit dapat tergambar dalam total APBD yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2010-2015.

Dilihat dari sisi kemampuan fiskal daerah, maka kondisi tersebut di atas menjadi catatan penting, bahwa kemampuan atau kemandirian fiskal daerah Kabupaten Mamuju masih sangat perlu ditingkatkan untuk berubah dari Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju. Meskipun empat indikator lainnya, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan sektor basis sudah memberi sinyal yang baik dan layak untuk mendorong percepatan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori kota sedang dilihat dari sisi jumlah penduduk.

Kabupaten Mamuju memiliki share terendah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB, di antara kabupaten lain di Sulawesi Barat, dan dari tahun ke tahun mengalami penurunan share, sebaliknya sektor non primer semakin meningkat sharenya.

Kabupaten Mamuju mengalami angka pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi setelah Kabupaten Mamuju Utara (2010-2015).

Di antara 17 sektor yang dianalisis, terdapat 14 sektor yang dalam kategori basis, dan tertinggi di antara lima kabupaten lainnya di Sulawesi Barat.

Rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) selama enam tahun terakhir sebesar 4,73 persen, sementara secara nasional sebesar 6,3 persen.

Dengan demikian, di antara lima indikator yang diamati, terdapat empat indikator yang menyatakan, bahwa Kabuapten Mamuju cukup layak berubah status dari “Kabupaten Mamuju” menjadi “Kota Mamuju”, kecuali indikator kemandirian fiskal yang relatif masih rendah (rata-rata

4,97 persen) lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 6,5 persen terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, L, 1999, Pangantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi, FE-UI Jakarta
- Asdar, Muhammad, dkk, 2008. Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Maluku Utara. Kerjasama Bappeda Makassar dengan Lembaga Penelitian Unhas.
- BAPPENAS, (1999), "Menatap Kedepan Perekonomian Indonesia," BAPENAS: Jakarta.
- Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), "Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999," Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta
- BPS., Kabupaten Majene dalam Angka. Berbagai Terbitan 2009-2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Majene.
- BPS., Kabupaten Mamasa dalam Angka. Berbagai Terbitan 2009-2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mamasa.
- BPS., Kabupaten Mamuju dalam Angka. Berbagai Terbitan 2009-2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mamuju.
- BPS., Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka. Berbagai Terbitan 2009-2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mamuju Utara.
- BPS., Kabupaten Polman dalam Angka. Berbagai Terbitan 2009-2016 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Polman.
- BPS., Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka, Berbagai Terbitan 2009-2016, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar.
- BPS., Kabupaten Mamuju Tengah dalam Angka, 2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Latihan. Cet. 1, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiono, 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, BPFE, UGM, Yogyakarta
- Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2006. Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Bank Indonesia Makassar, Makassar.
- Garth L. Mangun and David Srudker, Manpower Planning for and Lokal Labour Marker, olympus publishing company salt lake
- Jhingan, ML. 2000 The Economics Of The Development And Planning (terjemahan guritno)
- Kadariah. 1985. Ekonomi Perencanaan. LPEUI, Jakarta.
- Karmin, 2006, Analisis Percepatan Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara, Skripsi, FE-Unhas, Makassar
- Kepel, et al, 2000. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan SangiheTalaud, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.

-
-
- KPPOJ, 2011. Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah Di Sulawesi Selatan. Makassar.
- Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Jakarta. UI Press, Jakarta.
- Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Baseline Survey Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Sulawesi Selatan, Kerjasama Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Penelitian UNHAS, Makassar, 2006
- Lyn, Square, 1982. Kebijaksanaan Kesempatan Kerja Di Negara-Negara Sedang Berkembang. Publikasi Riset Bank Dunia. Penerbit UI-Pres. Jakarta
- Lyn, Square, 1999. Pembangunan Ekonomi. Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Madris dan Ahmad Alim Bachri, 2007. Kegiatan Pendampingan Pembinaan Sentra IKM Pertenunan Sarung/Kain Sutra Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Kerja sama dengan Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat). Polewali Mandar.
- Madris, dkk., 2007. Analisis Pemetaan Lembaga Pembiayaan Bank dan Bukan Bank dalam Penyaluran Kredit pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan, (Kerja sama dengan Bank Indonesia), Makassar.
- Madris, dkk., 2008. Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Pangkep, Pangkajene
- Madris, dkk., 2008. Kajian Masyarakat Miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- Madris, dkk., 2008. Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Madris, dkk., 2009. Kajian Kemiskinan dan Pekerjaan Alternatif Penduduk Miskin di Kota Parepare. Kerjasama dengan Bappeda Kota Parepare, Parepare.
- Madris, dkk., 2010. Identifikasi dan Pengembangan Komoditi Unggulan Di Kota Makassar, Kerjasama dengan Bappeda Kota Makassar
- Madris, dkk., 2011. Survei Komoditas Produk dan Jasa Unggulan (KPJu) Di Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama dengan Bank Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Unhas, Makassar.
- Madris, dkk., 2012. Profil Ketenagakerjaan Di Kota Makassar. Kerjasama dengan Bappeda Kota, Makassar
- Mangiri K., 2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom, BPS Pusat, Jakarta.
- Nindiana, 2008, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Di Kabupaten Nunukan (2000-2005), Tesis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sabir, dkk., 2009. Pemetaan Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi di Kota Parepare, Kerjasama dengan Bappeda Kota Parepare. Parepare
- Sabir, dkk., 2010. Analisis Pemetaan Komoditi Unggulan dan Investasi di Kabupaten Pinrang. Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Pinrang.
- Sagir, sudharsono, 1982 Kesempatan Kerja Dan Ketahanan Nasional Dan Pembangunan Indonesia Seutuhnya, Bandung.
- Suryana, 2000, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, (2002), "Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta

-
-
- Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tiro, Arif, dkk., 2007. *Integrasi Sistem Infrastruktur Terpadu Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Ekonomi Antar Daerah di Sulawesi Selatan*.
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid II* Erlangga, Yogyakarta